



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DPRD

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MARTIN LUTHER MAROMON
2. Jabatan : SEKRETARIS DPRD
3. NHK : 403514

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.100.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/96 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 182 m2/182 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 343 m2/343 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	716.500.000
1. MOTOR, HONDA NC11BF1D A/T Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000		
2. MOBIL, DAIHATSU MINI BUS Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000		
3. MOBIL, SUZUKI PICK UP BOX Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 182.000.000		
4. MOBIL, HONDA HR-V 1.5 L SE CVT Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 356.500.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	---
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	22.989.861



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp. ---
Rp. 1.839.489.861

III. HUTANG

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. ---
Rp. 1.839.489.861

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.